



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJSITTI HUSNAENAH.
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 80920

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.625.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/144 m2 di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/90 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 290.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, SUZUKI NEX SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000



5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
6. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 158.182.301

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.125.182.301

III. HUTANG Rp. 160.516.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.964.665.801

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.